

TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Nuratikah Nasution¹, Silva Nurul Hasanah², Renny Maisyarah³
nuratikahnasution8@gmail.com¹, silvanurulhasanah12@gmail.com²,
rennymaisyarah@gmail.com³

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterbukaan informasi keuangan daerah. Selain itu, pengawasan internal yang efektif dan kompetensi aparatur yang memadai berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan Daerah, Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri. Kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah juga diikuti oleh tuntutan yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem keuangan daerah. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan berbagai sistem informasi keuangan yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan yang dipublikasikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi tata kelola keuangan daerah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan pengawasan internal yang kuat serta partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan pengawasan internal dapat mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, good governance menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari praktik penyimpangan.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

Penerapan transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengawasan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah dalam menjelaskan hasil dan dampak dari penggunaan anggaran yang telah dilakukan.

4. Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi keuangan memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review). Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, serta artikel yang membahas pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dan disintesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi tata kelola keuangan daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Daerah

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem informasi keuangan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengelola data keuangan secara lebih cepat dan akurat.

Penggunaan teknologi informasi memungkinkan proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, informasi keuangan dapat dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan lebih mudah.

Namun, transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi. Informasi yang dipublikasikan juga harus mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam praktiknya, banyak laporan keuangan yang masih menggunakan istilah teknis sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Akibatnya, tujuan transparansi belum sepenuhnya tercapai.

B. Penguatan Pengawasan Internal sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas

Pengawasan internal merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran serta memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inspektorat daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Melalui audit internal dan evaluasi berkala, berbagai kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Selain itu, pengawasan internal juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi aparatur pemerintah agar mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

C. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan, teknologi informasi, dan regulasi keuangan akan lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sebaliknya, keterbatasan kompetensi aparatur dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan rendahnya kualitas informasi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kebutuhan yang sangat penting.

D. Tantangan dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik

Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang optimal. Tantangan tersebut antara lain:

- Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah.
- Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
- Kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan daerah.
- Masih adanya risiko penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola keuangan

daerah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

E. Strategi Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi informasi.
- Melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan bagi aparatur pemerintah.
- Memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal.
- Menyederhanakan penyajian informasi keuangan bagi masyarakat.
- Mendorong partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

Melalui strategi tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Transformasi tata kelola keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan pengawasan internal merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah, sementara pengawasan internal berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan publik.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat, tata kelola keuangan daerah yang baik dapat diwujudkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nordiawan, D. (2018). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Sedarmayanti. (2018). Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1248>
- Nugroho, B. H. (2018). Konvergensi Adat dan Syarak dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum & Sosial Kemasyarakatan, 17(02).<https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/63>
- Nurdin, F., Supian, S., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2(02), 341–364. doi:10.22437/titian.v2i02.6082 <https://doi.org/10.22437/titian.v2i02.6082>
- Oktaviarni, F., Suryahartati, D., Amir, D., & Windarto. (2022). Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi: Pewaris dan Ahli Waris. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.6 No.1.<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/27069>
- Rahman, R., & Hartono, B. (2018). Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis UNAJA. <https://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/en/article/view/135>

Santi, C. F. (2024). Nilai-Nilai Budaya dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi Ditinjau dari Perspektif Islam. *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 1–13. <https://tamaddun.fah.uinjambi.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/54>